

TREN PENYIDIKAN KASUS KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN SELAMA TAHUN 2006-2015



**JAKARTA
SELASA, 17 MEI 2016**

TUJUAN

- Melakukan pemetaan terhadap kasus korupsi yang disidik oleh Aparat Penegak Hukum, khususnya pada kasus korupsi di sektor pendidikan. Hal yang dilihat meliputi : total kasus korupsi selama tahun 2006-2015, total nilai kerugian negara selama tahun 2006-2015, jabatan aktor tersangka korupsi, modus yang dilakukan, objek dana yang dikorupsi, dan kategori objek dana yang dikorupsi (PBJ dan Non PBJ).
- Melakukan pemetaan terhadap kasus korupsi sektor pendidikan terkait dengan kategori objek dana yang dikorupsi.

METODOLOGI

- Melakukan pemantauan kasus korupsi sektor pendidikan di tingkat penyidikan yang sudah ada penetapan tersangka
- Kasus korupsi pendidikan yang telah diungkap ke publik oleh penegak hukum, baik melalui website resmi atau melalui media massa.
- Melakukan tabulasi atas kasus-kasus yang terungkap ke publik dan terpantau oleh ICW
- Melakukan analisis deskriptif atas kasus korupsi sektor pendidikan yang berhasil disidik oleh Aparat Penegak Hukum

SUMBER DATA

- Website resmi institusi penegak hukum
- Media *Online* dan Cetak

**DISCLAIMER : DATA YANG DIOLAH BERDASARKAN
HASIL PEMANTAUAN ICW SELAMA TAHUN 2006-2015**



TEMUAN

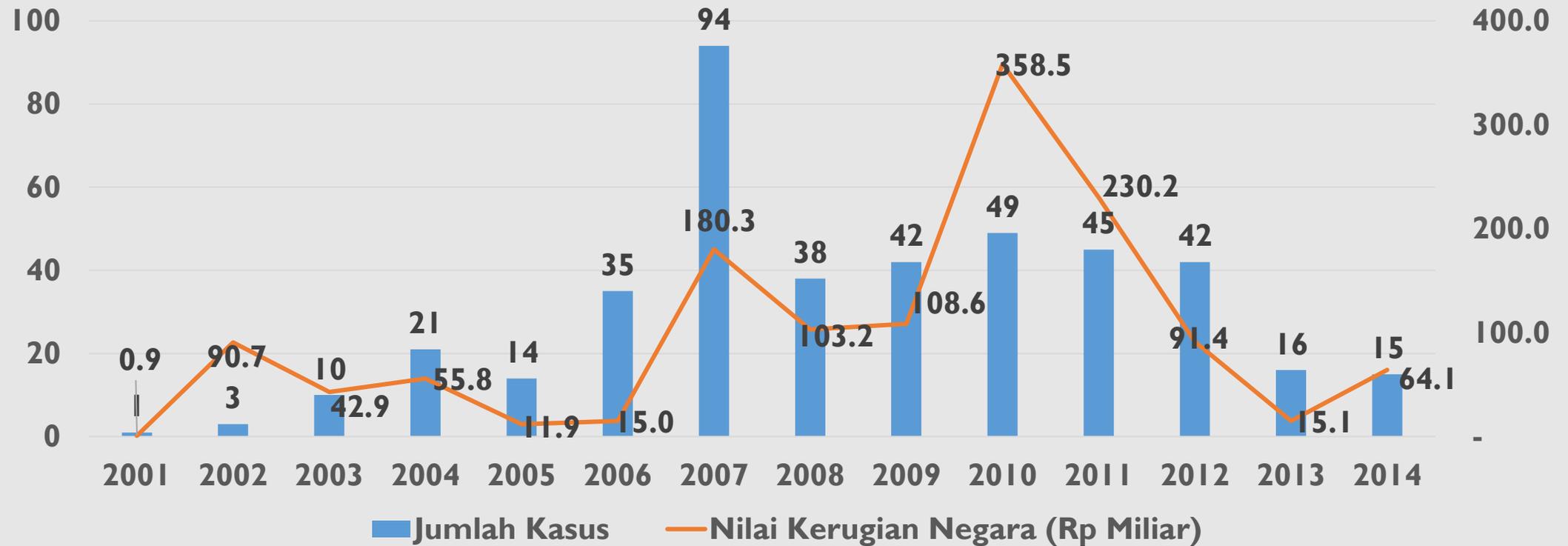
PROFIL KASUS KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN MULAI DARI TAHUN 2006-2015

KETERANGAN	TOTAL
Jumlah Kasus	425 Kasus
Jumlah Tersangka	618 Tersangka
Nilai Kerugian Negara	Rp 1.3 Triliun
Nilai Suap	Rp 55 Miliar

Selama 1 dasawarsa, korupsi di sektor pendidikan mencapai 425 kasus. Sebanyak 618 orang ditetapkan sebagai tersangka. Nilai kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 1.3 triliun dan nilai suap sebesar Rp 55 miliar.

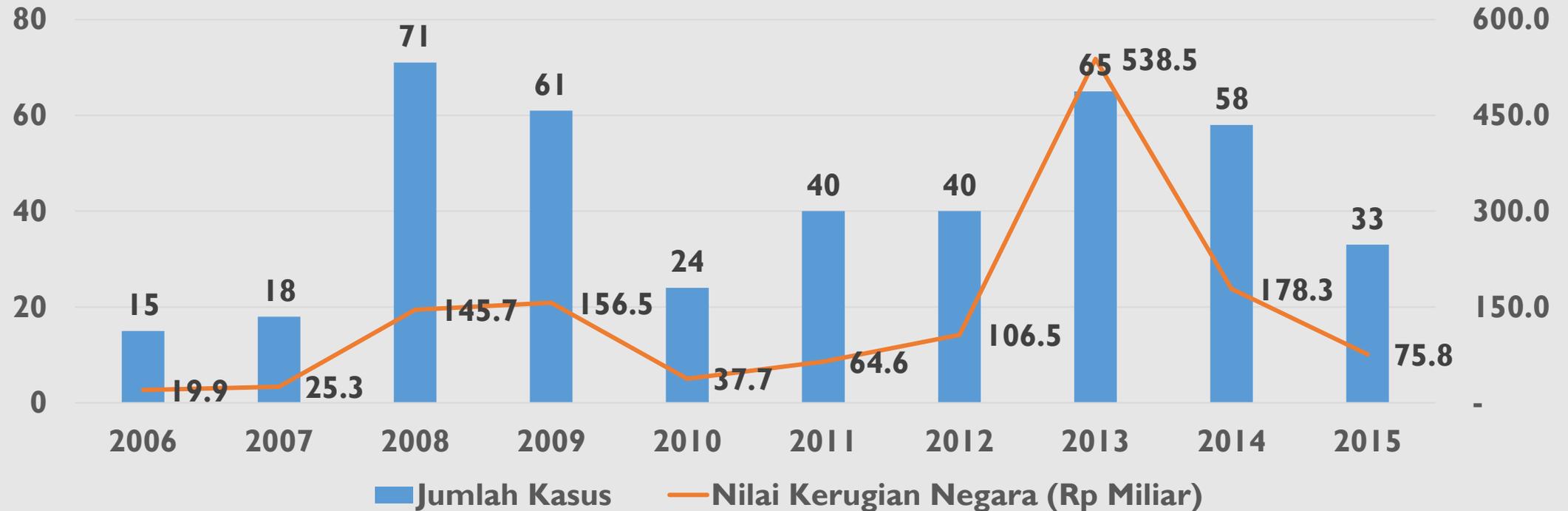
INDONESIA CORRUPTION WATCH

TREN PENYIDIKAN KASUS KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN BERDASARKAN TAHUN TERJADI



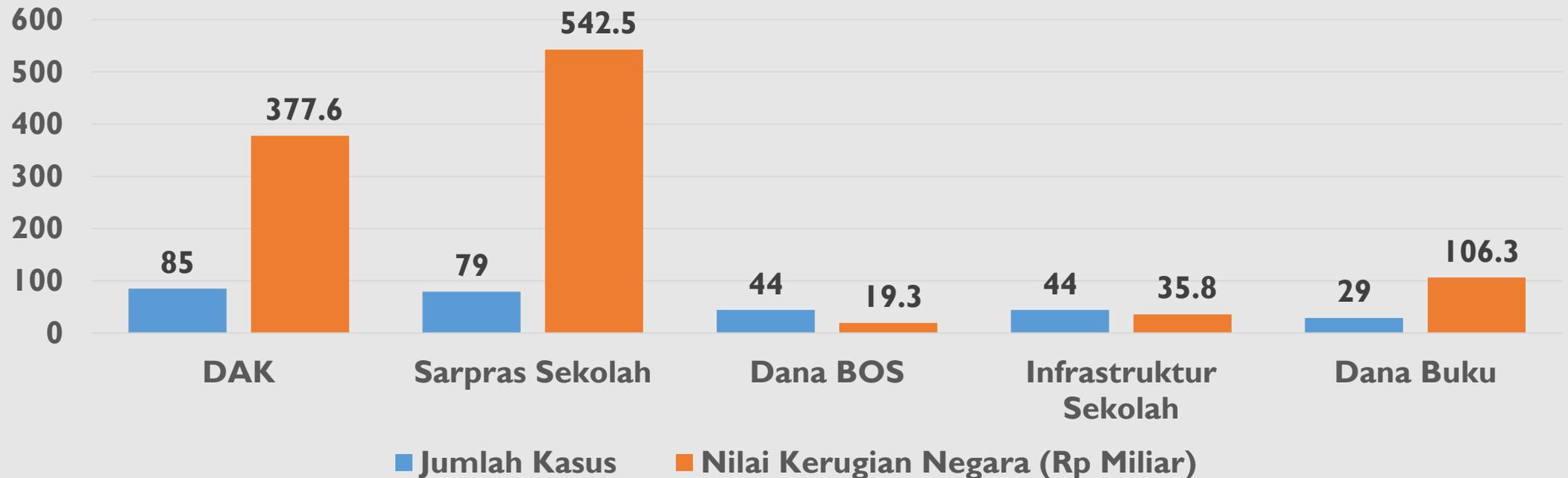
- Terjadinya peningkatan kasus korupsi yang terjadi antara rentang waktu 2001 ke 2007. Kasus korupsi paling banyak terjadi pada tahun 2007. Namun setelah itu, kasus korupsi sektor pendidikan cenderung menurun.
- Pada sisi kerugian negara, cenderung fluktuatif mulai dari tahun 2001-2009. Nilai kerugian negara yang paling besar terjadi pada tahun 2010. Setelah itu, nilai kerugian negara yang terjadi di sektor pendidikan mengalami penurunan signifikan.

TREN KASUS KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN BERDASARKAN TAHUN PENYIDIKAN



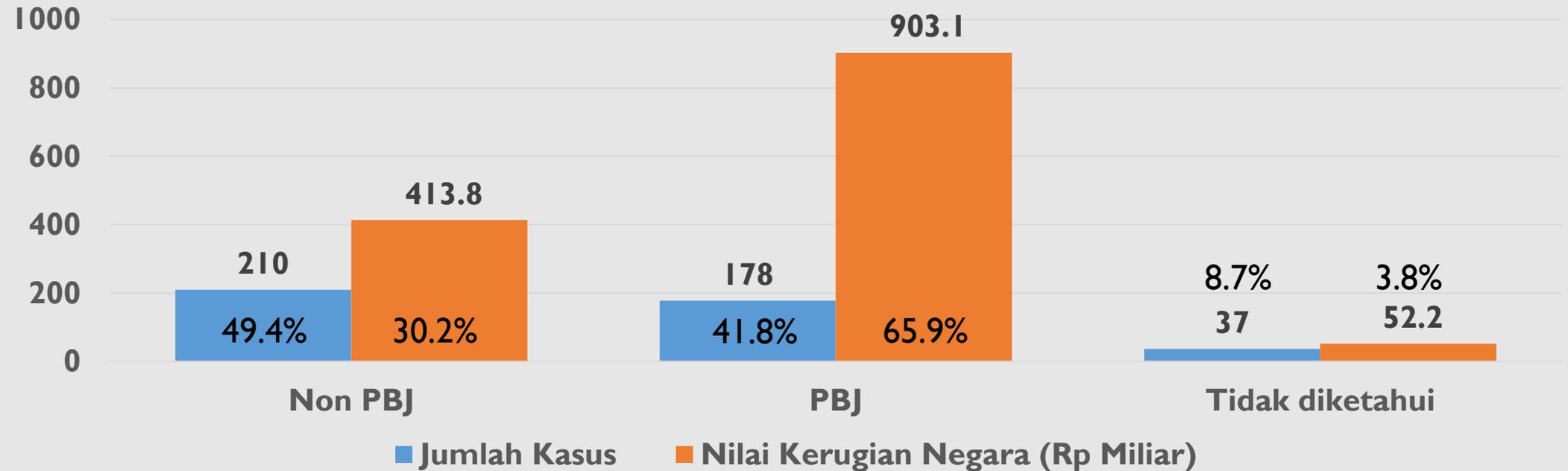
- ICW melakukan monitoring atas kasus korupsi yang telah masuk dalam tahap penyidikan. Mulai dari tahun 2006-2015, jumlah kasus korupsi pada sektor pendidikan yang disidik cenderung naik turun.
- Mulai dari tahun 2006-2012 nilai kerugian negara yang ditimbulkan cenderung datar. Namun pada tahun 2013, terjadi kenaikan nilai kerugian negara yang signifikan mencapai Rp 538 miliar. Salah satu kasus yang pernah disidik tahun 2013 adalah kasus dugaan korupsi dana BOS TA 2011-2012 tentang pembelian buku. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 9 miliar.

KASUS KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN BERDASARKAN OBJEK KORUPSI (5 TERBESAR)



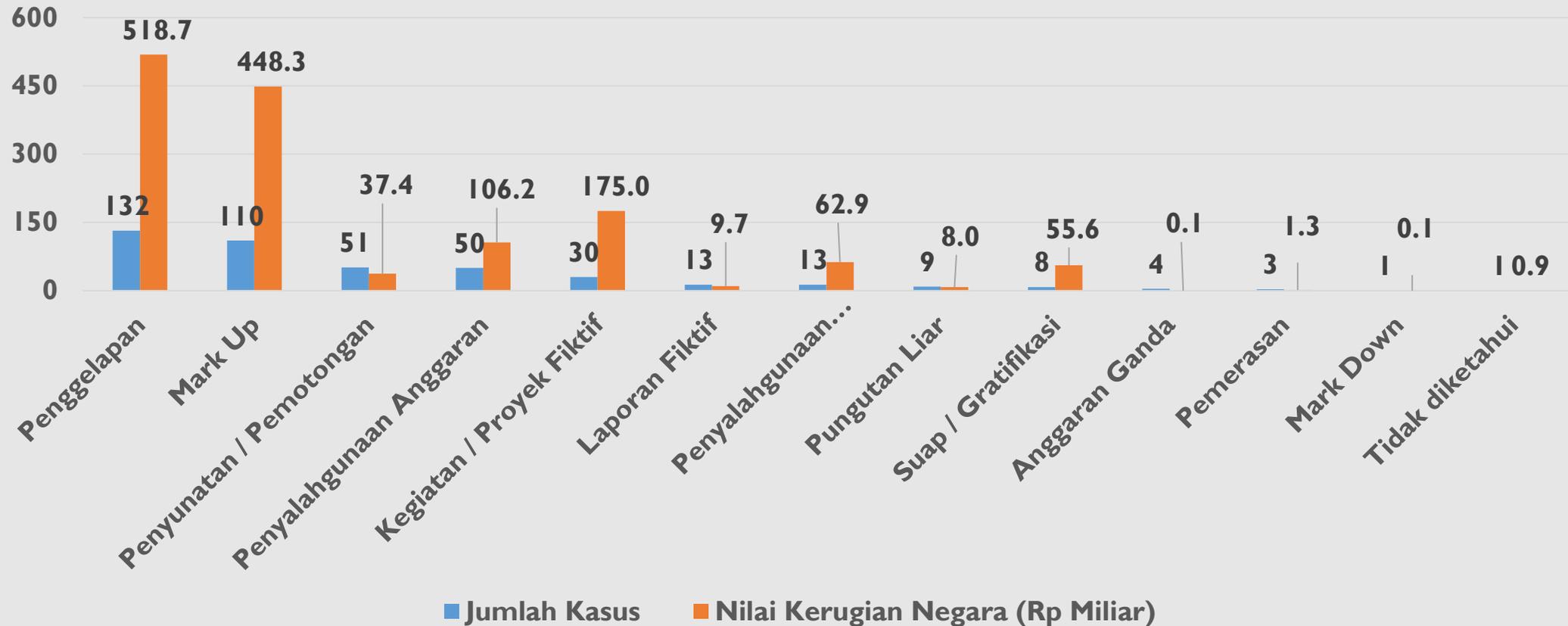
- ICW melakukan identifikasi terhadap objek apa saja yang rawan dikorupsi pada sektor pendidikan. Sedikitnya ada 17 objek yang rawan untuk dikorupsi, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Sarana dan Prasarana sekolah, Dana BOS, infrastruktur sekolah, dll.
- DAK menjadi objek korupsi yang rentan untuk dikorup. Selain itu juga ada Sarana dan prasaran sekolah yang memiliki potensi untuk dikorupsi.

KASUS KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN BERDASARKAN KATEGORI OBJEK KORUPSI



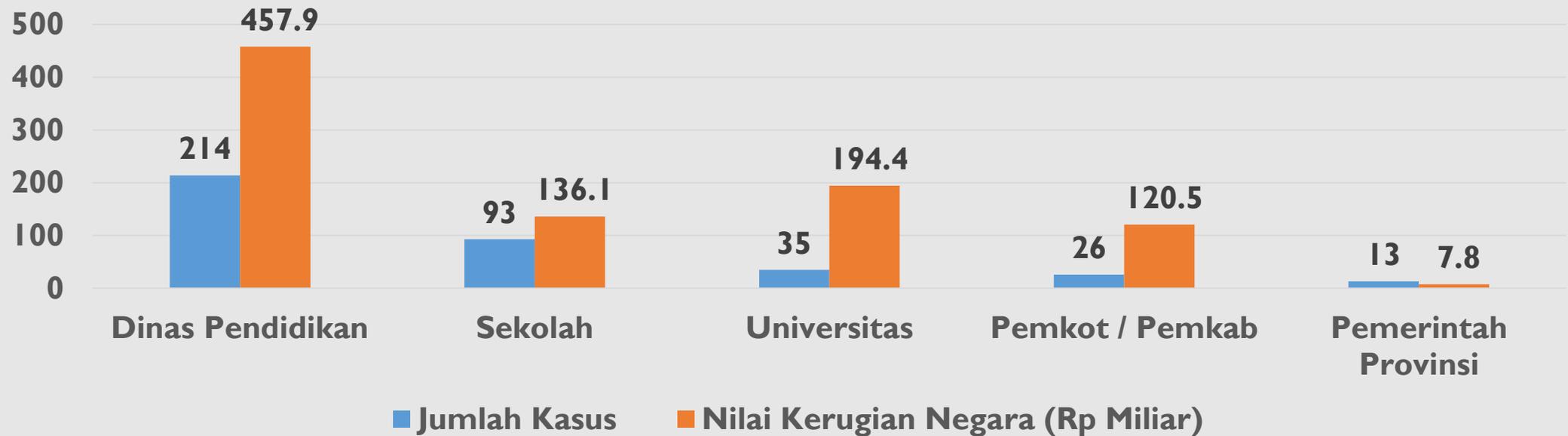
- Kasus korupsi yang paling banyak terjadi ada pada kategori Non PBJ, sebanyak 210 kasus. Sedangkan untuk kategori PBJ, ada sekitar 178 kasus yang berhasil dipantau oleh ICW. Hal yang menarik adalah, meskipun Non PBJ lebih banyak dari segi kuantitas kasusnya, namun dari sisi nilai kerugian negara, kategori PBJ lebih banyak. Tidak tanggung-tanggung, nilai kerugian negara yang disebabkan oleh PBJ adalah sebesar 65.9%. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah untuk memperbaiki system pengadaan barang dan jasa, khususnya di sektor pendidikan.

KASUS KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN BERDASARKAN MODUS



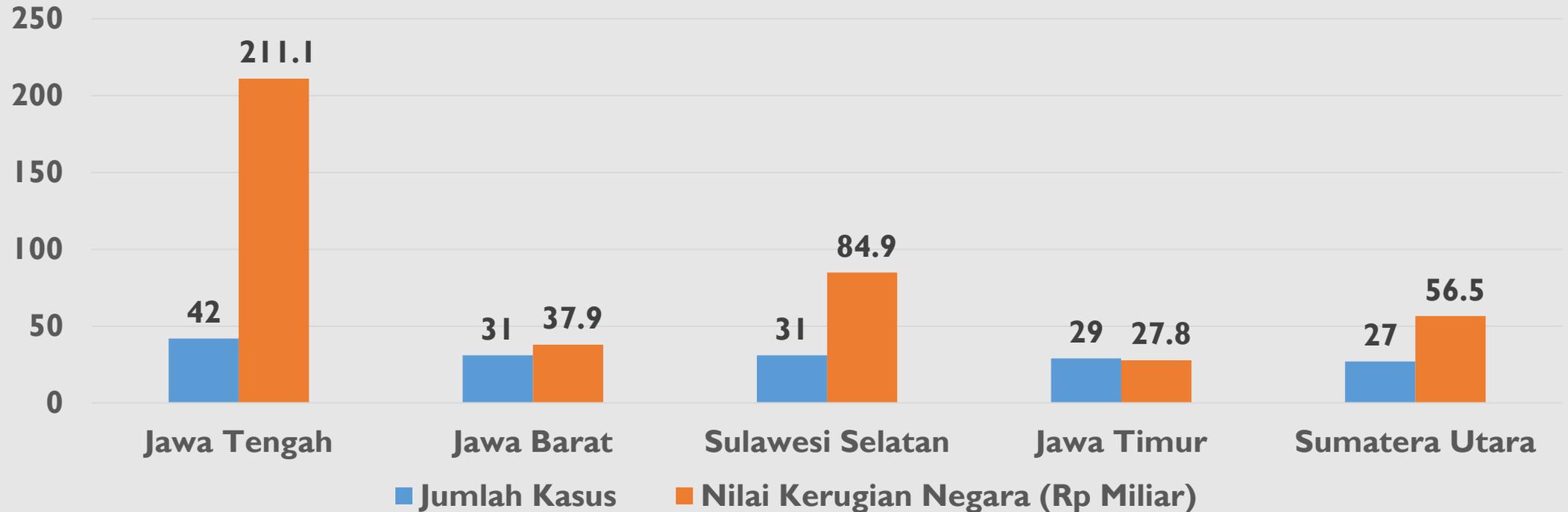
- ICW melihat bahwa modus yang paling sering digunakan di sektor pendidikan adalah **PENGGELAPAN** sebanyak 132 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 518.7 miliar.
- Selain penggelapan, modus yang sering digunakan adalah **MARK UP** sebanyak 110 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 448.3 miliar.

KASUS KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN BERDASARKAN LEMBAGA TEMPAT KORUPSI (5 TERBESAR)



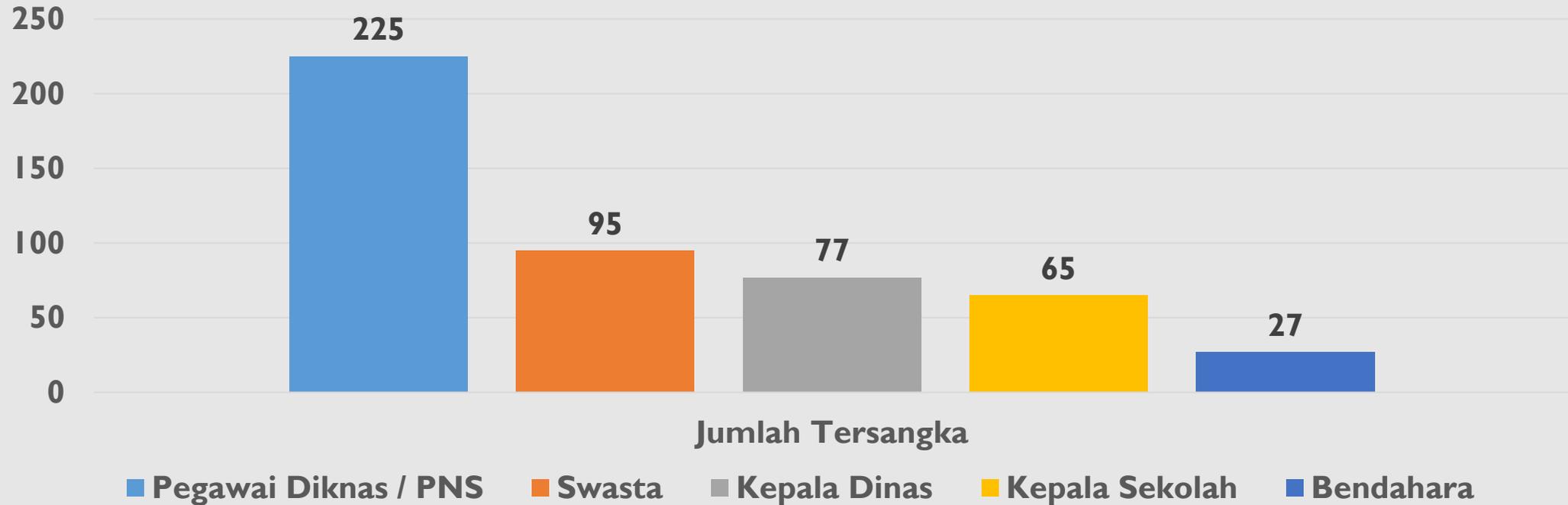
- ICW memantau lembaga tempat terjadinya praktek korupsi. ICW mengidentifikasi sebanyak 15 lembaga yang rawan terjadi korupsi. Mulai dari Kementerian Pendidikan hingga Ormas.
- Dinas Pendidikan merupakan tempat terjadinya korupsi terbanyak yaitu 214 kasus dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 457,9 miliar.
- Hal yang menarik adalah sekolah menjadi tempat terjadinya korupsi terbanyak kedua setelah Dinas Pendidikan.

KASUS KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN BERDASARKAN PROVINSI (5 TERBESAR)



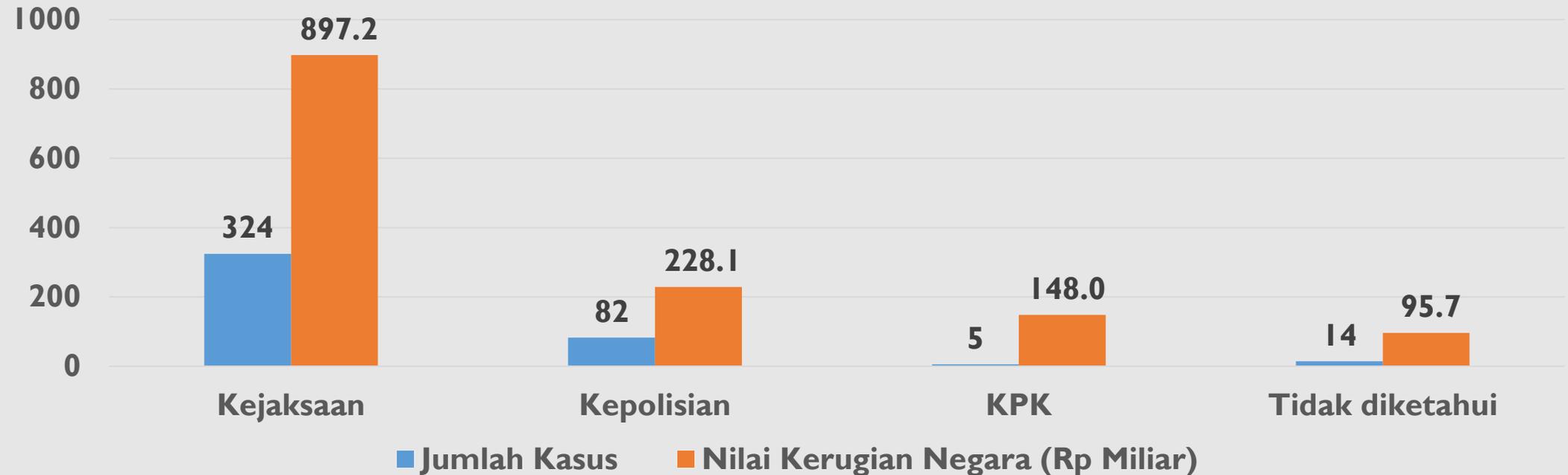
- ICW juga memantau kasus korupsi yang terjadi di tingkat Provinsi.
- Kawasan Jawa, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur menjadi Provinsi yang paling banyak terjadi kasus korupsinya selama rentang waktu 2006-2015 sebanyak 104 kasus. Total nilai kerugian negara yang ditimbulkan dari ketiga Provinsi tersebut sebesar Rp 276.8 miliar.

KASUS KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN BERDASARKAN JABATAN (5 TERBESAR)



- Tersangka dalam kasus korupsi di sektor pendidikan yang paling banyak adalah pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan. Sebanyak 225 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
- Lalu, Swasta di urutan kedua terbanyak dengan 95 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
- Selain itu berdasarkan pemantauan ICW, dalam rentang waktu 10 tahun ada sekitar 77 Kepala Dinas Pendidikan yang dibui karena tersangkut kasus korupsi.

KASUS KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN BERDASARKAN APARAT PENEGAK HUKUM



- Aparat penegak hukum yang menangani kasus korupsi paling banyak adalah Kejaksaan dengan 324 kasus korupsi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 897.2 miliar.
- Lalu, Kepolisian menangani 82 kasus korupsi dengan kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 228.1 miliar.
- Sementara itu berdasarkan pemantauan ICW, KPK menangani 5 kasus korupsi di sektor pendidikan dengan nilai kerugian sebesar Rp 148 miliar.

KESIMPULAN

- Dana yang paling rawan dikorupsi pada sektor pendidikan adalah Dana Alokasi Khusus, dana BOS, dana infrastruktur sekolah, dana sarana dan prasarana, dan dana buku pelajaran.
- Meskipun kasus korupsi pendidikan di sektor PBJ cenderung rendah dibandingkan dengan sektor non PBJ, namun kerugian negara yang ditimbulkan cenderung tinggi sekitar 65%.
- Modus korupsi yang sering digunakan di sektor pendidikan adalah penggelapan dan mark up.
- Selama 10 tahun terakhir Dinas Pendidikan dan sekolah menjadi lembaga yang paling banyak terjadi korupsi.
- Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur menjadi Provinsi paling banyak terjadi praktek korupsi.
- Pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan seperti Kepala Dinas dan Pegawai Dinas Pendidikan adalah aktor terbanyak yang melakukan tindak pidana korupsi.

REKOMENDASI

- Perlu tindakan pencegahan yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta masyarakat agar dapat memantau proses penggunaan anggaran, khususnya dalam PBJ di sekolah.
- Perlu adanya tools yang dapat memantau PBJ khususnya di sektor pendidikan. Pencegahan menjadi penting karena dana yang digelontorkan untuk APBN di tahun 2016 mencapai Rp 419 triliun.
- Perlu adanya system yang dibangun untuk mencegah pejabat dan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan melakukan korupsi, khususnya terkait dengan PBJ.



OPENTENDER.NET

TUJUAN

- Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memantau pengadaan barang dan jasa khususnya di sektor Pendidikan.
- Melakukan pencegahan korupsi di sektor pendidikan terkait dengan pengadaan barang dan jasa.
- Disclaimer :Tools ini hanya sebagai analisa potensi resiko.

KRITERIA

- Kriteria 1 : Nilai kontrak relative besar
- Kriteria 2 : Jumlah peserta tender sedikit
- Kriteria 3 : Efisiensi HPS / Kontrak
- Kriteria 4 : Proyek konstruksi di quarter 4
- Kriteria 5 : Pemenang berulang

KASUS : PENGADAAN UPS

Tahun : 2014

Kategori : :SEMUA:

Sumber Dana : :SEMUA:

Entitas : Daerah

Daerah : DKI Jakarta

Daerah II : :SEMUA:

LPSE : :SEMUA: Ketik & cari

Data eProc 2014

Σ Kontrak	Rp. 5.969.883.369.377	Σ Penyedia	688
x Kontrak	Rp. 2.889.585.368	x Peserta	4
x Pagu	Rp. 3.390.777.401	Σ LPSE	1
Σ Paket	2.066	Σ Agen	25
x Trilwulan	ke-3	Σ SKPD	277

Database Charts **Top 10** Reset

10 Proyek eProc 2014										Potensi Resiko
NO.	NAMA PROYEK	PENYEDIA	PENGUMUMAN	AKHIR LELANG	NILAI KONTRAK	PAGU	HPS	KONTRAK : HPS	T/P	SKOR
1.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara (EO) Promosi Pariwisata dan Budaya Jakarta di Hongkong	PT. Proxima Convex	4 Nov 2014	-	6.660.944.400	6.903.629.997	6.899.985.400	97%	2/2	20
2.	Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS)	CV.ANUGERAH INDAH MAHAKARYA	17 Nov 2014	-	5.832.827.000	5.994.599.600	5.974.760.000	98%	5/5	20
3.	1.01.06.023.754 Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 35	PT. Dinamika Airufindo Persada	4 Nov 2014	-	5.832.750.000	5.999.999.600	5.974.760.000	98%	4/4	20
4.	Sewa Link Jaringan Komunikasi WAN dan Bandwidth Internet	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk	2 Apr 2014	-	11.369.718.800	11.586.216.400	11.506.495.000	99%	0/0	19
5.	Pengadaan Alat Penyemprot Sampah	PT. UNSAMA KARYATAMA	14 Nov 2014	-	7.040.000.000	7.481.360.000	7.480.000.000	94%	5/5	19
6.	Pengadaan Uninterruptible Power Suply (UPS) SMAN 7	MITRA JAYA PERKASA ABADI	7 Nov 2014	-	5.837.832.000	5.999.504.600	5.974.760.000	98%	7/8	19
7.	Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 77	CV.ANUGERAH INDAH MAHAKARYA	6 Nov 2014	-	5.832.827.000	5.999.504.600	5.974.760.000	98%	9/9	19
8.	Pengadaan Uninterruptible Power Suply (UPS) SMKN 39	PT. HAMPARAN ANUGERAH SENTOSA	6 Nov 2014	-	5.831.408.000	5.999.504.600	5.974.760.000	98%	3/3	19
9.	Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMAN 24	CV.WIDYA KARYA	7 Nov 2014	-	5.825.380.000	5.999.504.600	5.974.760.000	97%	7/8	19
10.	1.01.06.023.751 Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMKN 11	LUMBAN AMBAR BERBAKTI	4 Nov 2014	-	5.794.822.000	5.999.999.600	5.974.760.000	97%	7/7	19

KASUS : PENGADAAN UPS



Jakarta. Police say they have found indications of state losses amounting to at least Rp 50 billion (\$3.85 million) in last year's procurement of uninterruptible power supply equipment for schools in Jakarta.

"Based on the audit conducted by [police] investigators and the BPKP [State Finance Development Comptroller] there were mark-ups that caused state losses of Rp 50 billion," National Police spokesman Sr. Comr. Rikwanto said in Jakarta on Wednesday.

"This is still an estimate and the number will rise as we continue to calculate [the s]."



TUESDAY, 23 JUNE, 2015 | 06:34 WIB

Three DPRD Members Probed over UPS Corruption Case



TEMPO.CO, Jakarta - The Corruption Directorate of Criminal Detective (Bareskrim) of National Police examines

- Total ada 52 proyek pengadaan UPS di DKI pada tahun 2014
- Menduduki 7 dari 10 proyek paling beresiko di OpenTender (skor antara 19-20)
- Menelan anggaran sebesar 97 – 99 persen
- Partisipasi peserta minim (antara 3 – 11 perusahaan)
- Harga mahal: Rp 6 milyar per UPS
- Dilaksanakan pada akhir tahun (November 2014)



TERIMA KASIH

INDONESIA CORRUPTION WATCH

2016